

REGISTRASI	
NO.	36/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 03 April 2023
Jam	: 10:00 WIB

Bekasi, 28 Maret 2023

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 100 ayat 1, 237 huruf C, , 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Nama : Leonardo Siahaan, S.H
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000
 Tempat Tinggal : Perumahan: Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara Bekasi
 Pekerjaan : karyawan swasta
 Email : leonardoolefins@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Juni 1993
 Tempat Tinggal : Jalan Gudang Peluru Utara Blok C No 89 Tebet, Jakarta Selatan
 Pekerjaan : Legal Intern/Junior Associate SVS Law Firm
 Email : marpaungricky@rocketmail.com

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan

dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
7. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 100, 237 huruf C, 256, 422 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara;*
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

“ *Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti **P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;
5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (bukti **P-2 salinan Undang-Undang Dasar 1945**)*

6. bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Para Pemohon mendalilkan kerugiannya ialah bahwa didalam Pasal 100, 237 huruf

C, 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut (**bukti P-3 Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**):

1. Pasal 100 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. *rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau*
- b. *peran terdakwa dalam Tindak Pidana.*

Para pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusi secara potensial yang diakibatkan dari dampak adanya pemberian hukuman mati akan tetapi adanya masa percobaan. Menurut pemohon hukuman mati dianggap sebagai hukuman paling manjur untuk memberikan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Teror dan rasa takut karena kehilangan nyawa akan membuat para calon pelaku jera. Ini kemudian melahirkan kontrol dan stabilitas di masyarakat.

Kekhawatiran lain timbul ialah dengan adanya masa percobaan 10 Tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dll. Maka sangat dimungkinkan terjadinya jual beli surat pernyataan lepas. Dengan kemungkinan hal ini lah maka semakin merajalela jual beli surat pernyataan lepas dan sama sekali tidak berguna penjatuhan hukuman mati bagi terdakwa

2. Pasal 237 huruf C Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang”.

Berdasarkan bunyi frasa Pasal diatas, Para pemohon berpendapat timbulkan kekhawatiran Kerancuan terhadap identitas (lambang) negara akan merugikan banyak pihak, karena identitas (lambang) negara adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Potensi kerugiannya pun menjadi besar, karena menyangkut seluruh warga negara. Perbedaan dalam bentuk dan penggunaan tersebut. Padahal bila dilihat dengan bunyi Pasal 57 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sangat mirip bunyi nya dengan Pasal 237 huruf C diatas, yang bunyinya sebagai berikut;

“menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Padahal Pasal 57 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang didalam putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-X/2012. Salah satu bunyi Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi:

“Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo beralasan menurut hukum”

3. Pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Bahwa dengan berlakunya Pasal diatas, Para Pemohon sangat khawatir dan menimbulkan kerugian potensial, ini dikarenakan dalam Pasal tersebut mempidanakan bagi siapa saja melakukan unjuk rasa, demonstrasi di jalan umum atau sebagainya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang. Maka dalam Pasal tersebut tidak sejalan dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Pasal tersebut tentu saja menghambat masyarakat luas dalam melakukan demonstrasi karena sebagai bentuk kekecewaan terhadap Negara yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena adanya kekecewaan tersebutnya menjadi faktor utama masyarakat melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Ini berkaca dengan kasus demonstrasi Tahun 1998.

Selain itu bahwa Pasal 24 ayat 3 Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

“Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan tindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi”.

Bahwa semestinya bila penanganan terjadinya demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum adalah dengan cara persuasive, atau penghentian kegiatan bukan berupa pemindaan/peghukuman. Karena bagaimana pun bentuk pemindaan/penghukuman terhadap kasus demonstrasi di jalan umum atau sebagainya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang sebagai bentuk yang kejam dan mencoreng kebebasan berpendapat yang merupakan hak fundamental setiap warga negara

III. ALASAN PERMOHONAN

Para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. PEMERINTAH TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT ERGA ORMNES

Bahwa terdapat beberapa Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikatakan Pasal yang sudah pernah diuji dan dinyatakan Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar diberlakukan kembali oleh pembuat Undang-Undang. Seperti Pasal yang dimohonkan sekaligus menjadi objek permohonan pengujian Undang-Undang. Yaitu:

Pasal 237 huruf C Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang”.

Bahwa Pasal tersebut sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-X/2012. Adapun objek dari putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-X/2012 adalah Pasal 57 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang bunyi sebagai berikut;

“menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-X/2012 adalah sebagai berikut:

Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945

Dan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut;

“Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta);

Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mahkamah berpendapat bahwa kata “menjamin” dalam Pasal 32

ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk “memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan

kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia”.

“Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo beralasan menurut hukum”

Bahwa sangat terlihat jelas memasukan kembali Pasal yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Mengenai hal demikian Pemerintah telah mencoreng semangat konstitusi yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945

2. MENGHAMBAT KEBEBESAN BERPENDAPAT

a. Pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Bahwa pemohon berpendapat sekaligus merasa khawatir secara kerugiankonstitusional potensial. Bila terjadi sewaktu-waktu terjadinya demo besar-besaran diakibatkan pemerintah telah korup, sering melakukan KKN, atau bertindak semaunya/sewenang-wenang seperti layaknya kasusdemo tahun 1998. Bila kasus serupa terjadi dikemudian hari tanpa adanya pemberitahuan dulu kepada pihak berwenang maka sangat rentan terjadinya penangkapan yang tidak sah, dan abuse of power yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani demonstrasi yang tidak ada pemberitahuan mengenai demo.

Kemudian bahwa dengan berlakunya Pasal diatas, Pemohon sangat khawatir dan menimbulkan kerugian potensial dan dalam hal mengancam kebebasan berpendapat seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Dengan adanya frasa mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dengan kondisi yang dilihat secara praktikal dilapangan apalagi dengan diperlukan izin untuk melakukan demonstrasi akan timbul conflict of interest antara aparat yang berwenang terhadap demonstran

Jaminan Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat juga dijamin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi.

Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Karena pada dasarnya kebebasan berpendapat itu adalah universal, non-diskriminasi, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi-bagi, saling terhubung, dan saling terkait, dan tidak dapat dikesampingkan

Bila dilihat kebebasan menyampaikan pendapat selain dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dijamin pula oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) yang dijelaskan didalam Pasal 19 DUHAM:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Pemberlakuan Pasal 240 KUHP dengan Pasal 256 KUHP dikhawatirkan mengakibatkan kian merosotnya kebebasan berpendapat di Indonesia.

Beberapa data yang menggambar kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia 2022 saat ini.

- Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkap hasil survei terbaru tentang **kebebasan berpendapat**. Melalui survei yang dilakukan pada 11-21 Februari 2022 menunjukkan sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa takut berpendapat.
- Setara Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development mencatat angka kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia selama tahun 2022 mendapat nilai terendah.

Kebebasan berekspresi di Indonesia berdasarkan data survei Setara Institute hanya mendapat nilai 1,5. Skala pengukuran yang ditetapkan dengan nilai rentang dari 1-7.

Setara melaporkan indeks kebebasan berekspresi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,1 dibanding tahun 2021 yang mendapatkan skor 1,6.

“Upaya perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat masih jauh dari harapan. Alih-alih beranjak lebih baik, skor pada indikator ini justru mengalami regresi sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya,” kata peneliti Setara Institute Sayyidatul Insyiah dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/12/2022).

3. POTENSINYA PERMAINAN ANTAR PARA PIHAK

Pasal 100 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau

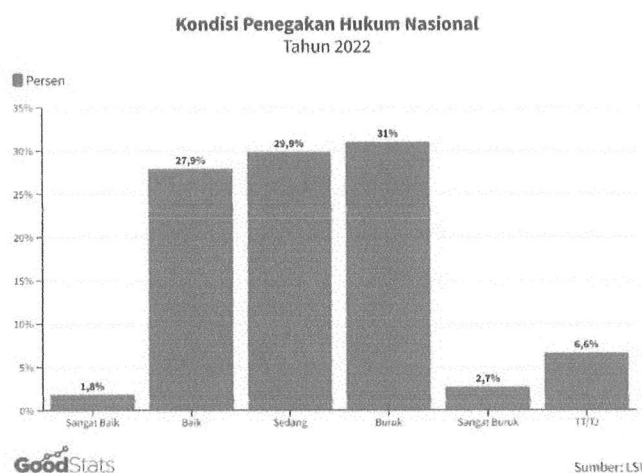
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Dalam frasa ayat 1 dan 2, menjadi suatu ironis dan menciderai perlindungan masyarakat dari pelaku yang sudah melakukan suatu tindak pidana yang mencela nilai-nilai masyarakat dan tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang meluas ke dalam lapisan masyarakat. Perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat menimbulkan tergoncangnya ekonomi suatu negara (misalnya nilai korupsi dari terdakwa cukup besar) terganggunya sistem pemerintahan (misalnya dari tindak pidana yang dilakukan pelaku melibatkan banyak pihak yang terjerat/terjerumus/ikut terlibat). Dampak-dampak demikian menimbulkan suatu opini didalam masyarakat bahwa sangat relevan diterapkannya pidana mati. Masyarakat yang mendukung pidana mati menganggap pidana mati sebagai obat kriminalitas untuk menimbulkan efek jera.

Meskipun dalam prakteknya sering kali pidana mati menimbulkan perdebatan parapihak. Dan ada yang berspekulasi bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang sudah dirumuskan didalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikumandangkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Tetapi pihak yang mendukung pidana mati karena didukung dengan fakta hukum yang bersifat tertulis didalam Pasal 6 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik “*Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang*”

Berdasarkan bunyi frasa Pasal 100 KUHP tersebut, kemungkinan besar dan sangat bisa terjadi terjadinya permainan para pihak untuk memberikan pernyataan bahwa terdakwa sudah merasa menyesal dengan perbuatannya. Pernyataan ini hanya bisa dikeluarkan oleh lapas yang bersangkutan dengan demikian menciptakan suatu dimensi kejahatan berupa jual-beli surat pernyataan. Ini beralasan dikarenakan Pada Maret 2022, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis sebuah temuan yang

mengungkapkan bahwa mayoritas responden yakni sebesar 31 persen menilai penegakan hukum di Indonesia tergolong pada kategori buruk. Sementara itu, 2,7 persen di antaranya bahkan menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat buruk.



1. Penilaian unsur kelakuan baik yang dimiliki terdakwa dalam masa percobaan 10 Tahun sangat sulit karena ini mengingat merupakan penilaian subjektif dari lembaga pemasyarakatan, karena ini berdasarkan murni dari penilaian subjektif masyarakat maka secara terang benderang di kemudian hari akan tercipta suatu kasus kontroversial terpidana mati yang berubah menjadi pidana seumur hidup.

Dan tentu saja ini akan berakibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mengingat krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum berdasarkan Dalam survei periode Oktober 2022, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh angka 51,5 persen. Artinya, pada aspek ini mengalami penurunan terdalam dari 57,5 persen pada Juni 2022 menjadi 51,5 persen

Survei tersebut tidak boleh dianggap remeh karena akan mempengaruhi kredibilitas kedepannya.

2. Berdasarkan pendapat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami. Yang kami kutib dari website hukum online yang berjudul "Tantangan Pemasyarakatan Mengubah Pidana Mati dalam Masa Tunggu"

Beliau mengungkapkan "terdapat pekerjaan rumah dalam membahas aturan pelaksana sebagai tindak lanjut dalam penerapan pidana mati. Baginya membina terpidana mati dalam masa percobaan 10 tahun bukan perkara mudah. Sebab, bila gagal, negara telah kehilangan anggaran, waktu, dan tenaga dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana mati."

Kami sependapat ini berdasarkan bahwa Permenkumham No.35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan terkait narapidana yang dianggap memiliki risiko tinggi ditempatkan di Lapas Super Maximum Security. Progam pembinaannya berupa pembinaan kesadaran beragama, kebangsaan dan bernegara, kesadaran hukum dan konseling psikologi. Dengan begitu, pihak Pemasyarakatan dapat mengontrol perubahan sikap dan perilaku, menerima pembinaan serta keterampilan yang diberikan.

Kami berpendapat bahwa Untuk itu, berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana sangat diperlukan perlengkapan-perengkapan dalam melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tentunya sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup terampil dan profesional.

Hak terpidana dalam mendapatkan bimbingan rohani merupakan hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 1995 yang berbunyi: "mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;".

Tentu saja adanya perawatan yang harus dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan artinya bila selama didalam lembaga pemasyarakatan terpidana mati tak kunjung berubah selama lebih dari 10 Tahun maka pemerintah telah gagal melaksanakan program tujuan dari dibentuknya Pasal 100 ayat 1 KUHP baru ini yang dimana pemerintah menganggap adanya masa percobaan 10 Tahun sebagai memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri, dan bukan hanya itu tentu saja biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembinaan rohani terpidana menjadi sia sia

3. Timbulnya masalah luas perbincangan masyarakat

Masalah luas dalam masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat dapat melakukan demo besar besar diakibatkan negara telah membuat keputusan yang tidak adil bagi masyarakat, hal ini dikarenakan negara dapat mengubah hukuman mati menjadi pidana seumur hidup.

Tentu saja dalam hal ini masyarakat semakin geram bagaimana mungkin kejahatan yang sudah dilakukan terpidana merupakan kejahatan yang mengancam masyarakat tetapi justru ketika hukuman pidana mati tersebut berubah menjadi pidana seumur hidup membuat masyarakat semakin merasa tidak didengar keinginan masyarakat.

4. Sebagai bahan pertimbangan tambahan mengenai fungsi pengawasan dalam eksekusi tindak pidana oleh kejaksaan yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

"melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat",

ini beralasan dikarenakan adanya ketentuan di dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdapat frasa rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Bahwa untuk menilai rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri merupakan kewenangan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi

"meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan".

Sementara di dalam Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP antara lain menjelaskan bahwa pidana mati yang diberikan kepada terdakwa dengan Keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung berubah menjadi pidana seumur hidup.

Dari hal ini dapat disimpulkan terjadinya pengalihan wewenang pengawasan dari Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang teruang di dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, "*Pelaksanaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya*", kepada Lembaga Pemasyarakatan. yang mengakibatkan eksistensi kewenangan Kejaksaan menjadi tidak jelas.

5. Para Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional dalam hal ini adanya frasa pidana mati dianggap pidana khusus. Pidana mati dalam UU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mengingat sanksi pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan alternatif pidana lainnya. Lebih lanjut diatur dalam Piagam Universal HAM pada pasal 3 dan pasal 5 yaitu dengan bunyi pada Pasal 3 dimana setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Pasal 5 dengan bunyi "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Para Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 100 ayat 1, 237 huruf C, 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Saya



Leonardo Siahaan, S.H



Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H